

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ekonomi Politik

Pada dasarnya ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yustika menjelaskan perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah alam pandangannya tentang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan dalam masyarakat adalah *given*. Dari dua pengertian ekonomi politik tersebut menjadi titik awal premis bahwa setiap kebijakan politik terutama di bidang ekonomi bukanlah murni kebijakan politik, tapi suatu perubahan pandangan dalam struktur masyarakat yang mempengaruhi dalam pencapaian ekonomi melalui struktur kekuasaan atau negara.

Ekonomi politik seringkali dikaitkan dengan interaksi antara ekonomi dan politik dalam suatu masyarakat yang mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi dan keputusan politik saling memengaruhi dan memengaruhi satu sama lain. Pendekatan yang digunakan ekonomi politik adalah permasalahan atau akibat yang timbul dari bidang ekonomi dan berkaitan erat dengan akibat dalam bidang politik. Pendekatan ini tidak menunjuk pada suatu teori tertentu, meskipun perkembangan yang

timbul dari perpaduan ilmu ekonomi dan ilmu politik akan menimbulkan keyakinan dan kecenderungan yang berbeda. melainkan mengklasifikasikan seluruh pendekatan yang secara eksplisit mempertimbangkan keterkaitan antara ekonomi dan politik (Andrias, 2005).

Analisis Mas'oed (1989) lebih lanjut menunjukkan bahwa analisis standar dalam ekonomi politik memerlukan pertimbangan tiga variabel, yaitu nilai, kepentingan, dan kekuasaan. Pertama, berdasarkan variabel nilai, apakah proses diterapkan berdasarkan nilai yang pro-kompetitif? (menekankan peran mekanisme pasar yang efisien, menghargai produktivitas, dan memperlakukan kesenjangan sebagai kondisi yang tidak dapat dihindari) atau nilai-nilai kooperatif (yaitu menekankan pada distribusi kesejahteraan yang adil dan memberdayakan lapisan paling bawah) Kedua, ada variable kepentingan, siapa yang diuntungkan dari proses ini? Dan siapa yang dirugikan? Terakhir, variabel kekuasaan dalam analisis ekonomi politik harus diperhitungkan. Siapa yang berkuasa? Apa sumber kekuatannya? Nilai dan kepentingan apa yang didukung oleh penggunaan kekuasaan ini? (Andrias, 2005).

Marx berpandangan dalam permasalahan ekonomi kapitalis bahwa berangkat dari ide “upah subsistensi”. Upah subsistensi atau “nilai dari tenaga kerja” ini besarnya akan ditentukan oleh “nilai dari sarana-sarana subsistensi atau sama dengan kebutuhan hidup pokok yang diperlukan untuk menyambung hidup pekerja. Dalam pandangan Marx, sistem kapitalisme tidaklah dapat meningkatkan subsistensi pekerja. Dengan kata lain, fakta

bahwa pekerja mendapatkan subsistensi dengan menjual tenaga kerjanya di pasar dan kemudian menggunakan uang dari upahnya untuk membeli barang kebutuhan tetap tidak mempengaruhi komposisi dari subsistensi itu sendiri. Para kapitalis akan berusaha untuk menemukan cara-cara agar pekerja bisa bekerja dengan lebih keras, lebih aman dan lebih efisien tanpa mengubah subsistensi mereka. Dan Marx yakin bahwa ada pertentangan kepentingan antarkelas dalam kapitalisme (Caporaso & Levine, 1992).

Ekonomi politik sosialis Marxis merupakan sebuah kerangka teoretis yang menggabungkan analisis ekonomi dan politik dengan prinsip-prinsip Marxisme. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan dinamika ekonomi dalam masyarakat kapitalis, Dasar dari teori Marxis adalah materialisme historis, yang menyatakan bahwa kondisi material atau ekonomi masyarakat adalah yang utama dalam menentukan struktur sosial, politik, dan ideologis. Ini berarti bahwa sejarah perkembangan masyarakat dilihat sebagai sejarah perjuangan kelas yang dipicu oleh kontradiksi antara kekuatan produktif masyarakat dan hubungan produksi.

Marxisme mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang berdasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh kelas pemilik modal. Dalam kapitalisme, nilai lebih (*surplus value*) yang dihasilkan oleh pekerja melalui proses produksi dirampas oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Dalam pandangan Marxis, negara merupakan alat kekuasaan kelas yang dominan. Dalam masyarakat kapitalis, negara berfungsi untuk

mempertahankan kepentingan kelas kapitalis melalui hukum dan kebijakan. Namun, dalam transisi menuju sosialisme, negara dapat berperan sebagai alat untuk menggulingkan kapitalisme.

Di Indonesia, sistem ekonomi yang dianut mengalami perubahan dari masa ke masa. Dari masa orde baru yang menganut sistem ekonomi campuran dibawah pemerintahan Soeharto yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap investasi asing dimana sektor publik dan swasta bekerja bersama mendorong pembangunan ekonomi hingga di era reformasi sekarang, Indonesia menganut ⁸sistem ekonomi pasar dengan regulasi dimana Indonesia berfokus pada ekonomi pasar yang lebih terbuka, namun tetap diiringi dengan regulasi. Pemerintah Indonesia mengadopsi langkah-langkah liberalisasi ekonomi yang mencakup pembukaan pasar, deregulasi, dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia juga berusaha menarik investasi asing sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonominya. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor asing untuk berinvestasi di berbagai sektor, termasuk manufaktur, infrastruktur, dan teknologi.

Di Indonesia, terutama sejak era Reformasi, kita melihat adanya ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di mana segelintir elite bisnis dan pemilik modal menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk modern dari struktur kelas yang dijelaskan oleh Marx, di mana eksploitasi tenaga kerja dan ketidaksetaraan

⁸ Andrew MacIntyre. *The Political Economy of Reform in Indonesia*.

pendapatan adalah realitas yang dihadapi oleh banyak pekerja di Indonesia. Di era Reformasi, meskipun ada usaha untuk mengurangi peran negara dalam ekonomi melalui privatisasi dan liberalisasi, negara masih memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi dan melindungi kepentingan bisnis besar melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Kasus-kasus korupsi dan kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha besar menunjukkan bagaimana negara bisa menjadi alat untuk melayani kepentingan elit. Meskipun Indonesia tidak mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme secara langsung, dinamika kapitalisme yang dianalisis oleh Marx tetap relevan dalam memahami tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh negara ini.

Dalam sistem kapitalis, harga dan layanan ditentukan oleh dinamika pasar melalui penawaran dan permintaan. Perusahaan transportasi online menggunakan algoritma dinamis untuk menetapkan tarif berdasarkan permintaan saat itu, yang memungkinkan fleksibilitas dan respons cepat terhadap kebutuhan pasar. Kapitalisme mendukung akumulasi modal melalui investasi swasta. Perusahaan transportasi online sering kali mendapatkan pendanaan dari pemodal dan pasar saham untuk mendanai ekspansi dan inovasi mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dengan cepat dan memperluas jangkauan layanan mereka (Rayle et al., 2016).

Neoliberalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pentingnya pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran

pemerintah dalam ekonomi. Dalam konteks industri transportasi online, neoliberalisme mempengaruhi berbagai aspek kebijakan dan operasional perusahaan. Neoliberalisme mendorong pengurangan regulasi pemerintah yang ketat terhadap industri transportasi online. Contohnya adalah penghapusan atau pelonggaran persyaratan lisensi dan izin operasi untuk perusahaan transportasi online yang memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih bebas dan efisien. Neoliberalisme mendukung privatisasi layanan yang sebelumnya mungkin dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan milik negara. Dalam konteks ini, perusahaan transportasi online mengambil alih peran dalam menyediakan layanan transportasi yang dulunya lebih diatur oleh pemerintah (Aspinall, 2016).

Keuntungan ekonomi sering kali terkonsentrasi pada pemilik modal dan manajemen perusahaan, sementara pengemudi menghadapi kondisi kerja yang tidak stabil dan pendapatan yang rendah. Deregulasi dan privatisasi sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. Meski industri ini menciptakan banyak peluang kerja, banyak pengemudi menghadapi ketidakstabilan pendapatan dan kondisi kerja yang kurang menguntungkan (Rosenblat & Stark, 2016).

Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan obsesi dari kebanyakan negara. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep *welfare state*. Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap

memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Ciri dasar konsep *Welfare state* adalah persamaan kesempatan atau *equality of opportunity*, pemerataan pendapatan atau *equitable distribution of wealth*, dan tanggung jawab publik atau *public responsibility* terhadap mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup layak.

Penerapan konsep *Welfare State* tak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Karena, terlepas dari Ideologinya, paling tidak suatu negara menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, menjaga kesejahteraan serta kemakmuran, pertahanan dan yang terakhir keadilan. Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif-institutionalist *welfare state*. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu.

Memang dapat dilihat bahwa secara konstitusional maka Indonesia menganut *welfare state*. Namun, jika dilihat secara realita di lapangan maka makna kesejahteraan sesungguhnya sesuai dengan konsep awal *welfare state* semakin bias. Pasalnya, dari seluruh Undang-undang maupun pasal yang ada di Indonesia tak jarang hanya sebatas aturan tertulis yang

tidak diimplementasikan secara penuh. Disinilah tanggung jawab serta peran negara dituntut untuk menciptakan negara yang sejahtera atau *welfare state*. Inti dari sistem ekonomi *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. *Welfare state* diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, *welfare state* dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar.

Otto von Bismarck, Perdana Menteri Jerman pada abad ke-19, dikenal sebagai salah satu pelopor konsep negara kesejahteraan. Dia memperkenalkan berbagai program sosial untuk pekerja, termasuk asuransi sosial, asuransi kecelakaan, dan asuransi pensiun. pembagian jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh. Di samping itu negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturanperaturan.

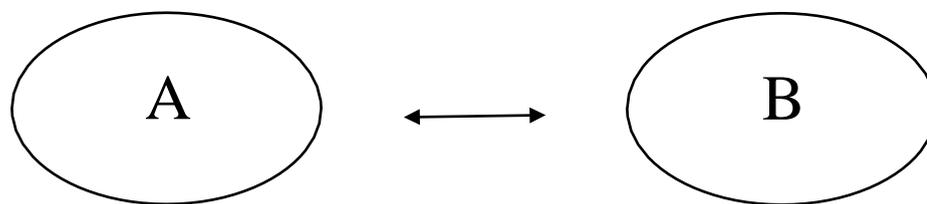
2.1.2 Hubungan Industrial

Konsep hubungan industrial membahas berbagai pokok pemikiran yang telah dihasilkan oleh berbagai kalangan, tentang eksistensi hubungan industrial sebagai salah satu disiplin ilmu maupun sebuah praktik kehidupan. Sesuai dengan sifatnya, konsep hubungan industrial senantiasa berkembang tergantung fenomena yang dipersepsi oleh pikiran. Istilah

hubungan memiliki konotasi adanya dua atau lebih unsur/analisis/elemen/komponen, konsep atau orang yang saling berinteraksi, saling berhubungan dan saling ketergantungan (interdependensi) dan juga pengaruh mempengaruhi.

Hubungan kausalitas yang juga sering disebut sebagai hubungan sebab-akibat atau hubungan Jika-Maka. Pada hubungan ini jika terjadi perubahan pada salah satu unsur, akan menghasilkan perubahan pada unsur yang lain.

Gambar 2.1
Kausalitas Hubungan Industrial

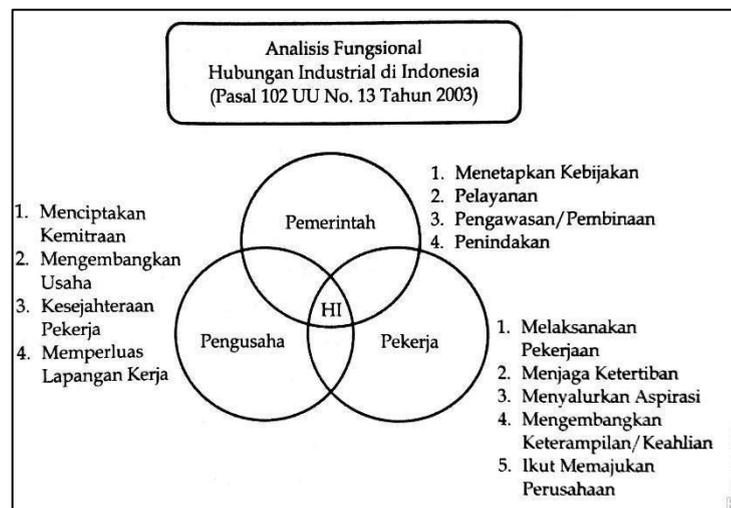


Sumber : Kartawijaya (2018)

Ciri-ciri utama dari suatu hubungan industrial adalah bersifat rasional, yaitu sikap dan Tindakan yang dilatarbelakangi oleh alasan dan motif yang mengarah pada suatu tujuan, baik yang ditetapkan dengan sadar atau tidak sadar oleh para pihak yang berhubungan. Kemudian harus adanya pola-pola yang disepakati, seperti : cara kerja, waktu yang digunakan, pembagian tugas dan risiko yang mungkin terjadi. Ciri lain dari hubungan industrial adalah tidak vertikal yang saling membawahkan (under geordnet), melainkan bersifat horizontal karena masing-masing memiliki unsur kepastian yang spesifik, bahkan relatif otonom. Hubungan industrial merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan

9interrelasi, interaksi) diantara para pelaku produksi yang satu sama lain saling ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi untuk mencapai tujuan bisnis organisasi (Kartawijaya, 2018).

Gambar 2.2
Analisis Fungsional Hubungan Industrial di Indonesia



Sumber: Kartawijaya (2018)

Pertama, adanya fungsi pengaturan (*regulating*). Pemerintah merancang kebijakan berupa peraturan perundang-undangan guna mengatur hubungan para pelaku industri. Kebijakan yang dirancang harus objektif agar kebijakan tersebut mengarah pada tujuan yaitu mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kedua, fungsi pelayanan (*Services*). Dalam melaksanakan kebijakan, pemerintah harus turun tangan untuk melakukan pembinaan, pelayanan perizinan, membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dan lain-lain. Ketiga, fungsi pengawasan (*Control*). Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan terlaksana sebagaimana mestinya agar tujuan kebijakan tercapai dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan

ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berwenang guna menjamin pelaksanaan kebijakan. Terakhir, fungsi penindakan. Penindakan merupakan fungsi pemerintah untuk menangani pelanggaran yang bersifat fatal dan berulang kali terjadi. Untuk meminimalisasi dampak yang lebih besar, diperlukan tindakan yang tegas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai pemahaman mendasar yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai fondasi bagi para peneliti untuk membentuk proses keseluruhan dalam penelitian. Sehingga kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan yang mampu membantu peneliti dalam menyusun sebuah gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji, hingga disajikan dalam sebuah penelitian nantinya. Konsep penelitian ini merujuk pada konsep penelitian permasalahan kesejahteraan mitra pengemudi mencakup beberapa aspek penting untuk masalah kesejahteraan Maxim di Tasikmalaya.

Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan mitra kerja *driver online* sebagai aspek utama yang akan diselidiki. Kesejahteraan dapat diukur melalui sejumlah variabel seperti pendapatan, jam kerja, akses terhadap layanan kesehatan, dan aspek-aspek psikologis dan sosial. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan *driver online*, termasuk tingkat pendapatan mitra pengemudi yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Bagaimana perbedaan upah dan struktur

penghasilan memengaruhi kondisi keuangan mereka dan bagaimana jam kerja yang panjang dan fleksibilitas dalam bekerja mempengaruhi kesejahteraan mitra pengemudi? Apakah perubahan jam kerja dapat meningkatkan kesejahteraan mereka?

Bagaimana kondisi kerja, termasuk faktor-faktor fisik dan lingkungan kerja, memengaruhi kesejahteraan bagaimana keamanan dalam bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana akses terhadap layanan kesehatan dan asuransi memengaruhi kesejahteraan mitra pengemudi? Apakah ada perbedaan signifikan antara mereka yang memiliki akses dan yang tidak. Penelitian ini akan menginvestigasi peran perusahaan penyedia layanan, seperti platform aplikasi Maxim dalam kesejahteraan mitra pengemudi mereka. Ini mencakup analisis kebijakan perusahaan yang memengaruhi kesejahteraan, misalnya, kebijakan tarif, insentif, atau perlindungan terhadap kecelakaan.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran pemerintah dalam melindungi hak-hak mitra pengemudi melalui regulasi dan peraturan. Ini termasuk regulasi terkait upah minimum, jam kerja, perlindungan sosial, dan hak-hak mitra pengemudi lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan memberikan wawasan yang berharga bagi mitra pengemudi, perusahaan penyedia layanan, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih baik, praktik bisnis yang berkelanjutan, dan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

